

ANALISIS VIDEO

Nama : Salwa Maulidda Utari

NPM : 2413053199

Kelas : 2F

- Judul Video
“Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? | Narasi Newsroom”
- Alamat Sumber Video:
<https://youtu.be/nNMKCKpIsH8?si=ttE6PIRzdKUtgEbw>
- Hasil Analisis Video
“Yang penting dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan” (Pernyataan Presiden Joko Widodo (3 Oktober 2020), terkait penanganan pandemi di Indonesia). Demokrasi menjamin kebebasan untuk berpendapat, sehingga pasti menyebabkan demokrasi yang berisik. Salah satu alasan utama negara-negara memiliki sistem demokrasi yang baik dan lebih mampu yaitu, negara tersebut mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Selain itu, Demokrasi juga dipandang sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.

“Negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih tinggi” (V-Dem Institute (2018). Schnakenberg and Faris (2014). Fariss (2019)). Jika dibandingkan negara demokrasi dengan negara non-demokrasi, secara garis besar negara demokrasi lebih kaya, karena memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi. Angka korupsi negara demokrasi lebih rendah, warga negaranya lebih Bahagia dan sehat, serta bisa menikmati lebih banyak jaminan atas HAM. Namun, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang sempurna. Sejak akhir 1980-an negara yang menganut sistem demokrasi meningkat pesat, tetapi pada 2019 indeks demokrasi di 165 negara menurun dari 5,48 ke 5,44. Di Indonesia pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demokrasi mengalami penurunan ranking yang sangat pesat. Demokrasi dilanda krisis disebabkan karena berbagai faktor antara lain, rendahnya kepercayaan kepada pemerintah dan politikus, anggota partai politik yang berkurang, hingga regulasi pemerintahan yang dianggap tidak transparan.

“Demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi adalah perjalanan yang kita tempuh bersama sebagai warga, sebagai bangsa, dan sebagai negara”
(Alex Tan, Pengajar Ilmu Politik, Universitas Chengchi, Taiwan)